

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Objek Penelitian

Pemilihan lokasi kerja praktek ini atas keinginan diri sendiri dengan mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua kerja praktek, maka dipilihlah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang pertanian, teknoklogi informasi dan informasi umum, yang beralamatkan di Jl. Surapati No.71, Sadang Searang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 10134.

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kegiatan sub sektor tanaman pangan di Jawa Barat sejak jaman penjajahan sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang mengembirakan baik dilihat dari segi pencapaian populasi, produksi, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, permintaan masyarakat konsumen, investasi maupun sumbangan bagi Devisa Negara.

Perkembangan tersebut tidak lepas dari keberadaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam peranannya untuk meningkatkan produksi, populasi, konsumsi dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan.

Pada masa penjajahan Belanda, lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat yaitu *Provinciale Lanbouw Voorlichtings dienst (LVD)* yang dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut *Landbouw inspecteur* ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912. Fungsi lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk meningkatkan produksi sedangkan alih teknoklogi diberikan dalam batas-batas tertentu karena atas dasar pertimbangan politis.

Kelembagaan LVD terdiri dari 2(dua) bagian yaitu :

1. Satuan organisasi LVD secara organik berada dibawah *Departemen Van Landbouw Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Batavia;
2. Kelembagaan *Zaad Hoeve* (Balai Benih Padi) yang didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur dan dikelola oleh LVD.

Pada masa pendudukan Jepang, penyelegaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh *Norinka* yang bernaung dibawah pemerintahan Jepang. Kebijaksanaan program maupun sistem pembinaan pertanian ditrapkan tidak berbeda pada jaman Belanda, yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi akan tetapi tujuannya diperluas dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang. Pengelolaan Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh *Norinka* Sedangkan dibidang pendidikan pertanian, pada jaman penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan nama *Landbouw Berdrijf School (LBS)* menjadi sekolah Pertanian Pertama.

Setelah Indonesia merdeka maka pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga di bawah Departemen kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, perkebunan, perikanan, kehewan dan penyalur bahan makanan. Balai Benih Padi Cihea Ex. *Norinka* dilanjutkan pengelolaannya oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea).

Pada tahun 1948 sekolah pertanian pertama tanjungsari diubah namanya menjadi sekolah Pendidikan Mantri Pertanian (SPMP). Pada tahun 1950 lahir Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah sementara Propinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang pokoknya menetapkan :

1. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, bagian tanaman perkebunan yang semula termasuk Jawatan Pertanian dipisahkan menjadi lembaga tersendiri bergabung dengan Jawatan Karet Rakyat Jawa Barat yang sekarang menjadi Dinas Perkebunan;
2. Dengan peraturan daerah Nomor 13/PD-DPRD-GR/ 1961 tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat dibentuk jawatan pertanian rakyat di daerah Tingkat II. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan diberikan oleh Jawatan Pertanian Rakyat Wilayah yang berkedudukan di Keresidenan.

Pada masa Kemerdekaan diklasifikasikan menjadi beberapa periode, yaitu :

1. Periode tahun 1945-1949

Pada periode tahun 1945-1949 terjadi beberapa perubahan diantaranya sebagai berikut:

- a. Jawatan Pertanian Republik Indonesia;
- b. Lembaga Pembenihan;
- c. Lembaga Pendidikan Pertanian.

2. Periode tahun 1969-1974

Pada Era Pertanian periode 1969-1974 terdapat beberapa lembaga pertanian yang telah mengalami perubahan-perubahan.

- a. Jawatan Pertanian Rakyat perubahan nama menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Lembaga Pembenihan
Lembaga pembenihan pada periode ini adalah:

- a. Pusat pembibitan tanaman jeruk;
- b. Balai Pertemuan Masyarakat Desa (BPMD) dan merupakan cikal bakal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
- c. Balai-balai benih dan Percontohan Pertanian Tanah Kering (PPTK);
- d. Penyerahan Balai Benih Padi Cihea/PP Cihea dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jabar;
- e. Penyerahan urusan dalam lapangan Pertanian;
- f. Perusahaan Pertanian Cihea (Cihea PP) di ubah menjadi Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea.

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga pendidikan pertanian adalah:

- a. Penambahan jurusan pada Sekolah Pendidikan Menteri Pertanian (SPMP) Tanjungsari dengan Sekolah Guru Pertanian (SGP) pada tahun 1951;
- b. Sekolah Pendidikan Pertanian/Sekolah Guru Pertanian Tanjungsari di ubah menjadi Sekolah Pengamat Pertanian;
- c. Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMPA);
- d. Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMPA) di tiap-tiap Kabupaten Daerah Tingkat II Jawa Barat;
- e. Berdiri Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMPA) Gegerkalong.

4. Periode tahun 1975 sampai dengan sekarang

Dinas Pertanian Tanama Pangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- a. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang perubahan istilah

Jawatan menjadi **Dinas** maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian rakyat;

- b. Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan maka Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984 dibentuk cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan di 6 daerah tingkat II yaitu : Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bandung dan Ciamis;
- d. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 tentang perubahan pertama peraturan daerah nomor 22 tahun 1984 tentang pembentukan cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan diadakan penambahan 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi perumusan program dan proyek;
 - b. Seksi bimbingan dan latihan.

Selain itu diadakan perubahan nama atau istilah seksi-seksi pada sub dinas penyuluhan.

5. Lembaga Perbenihan

Berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1986, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai perangkat Dinas :

- a. UPTD Balai Benih Induk Palawija, berkedudukan di Pumbon Kabupaten Cirebon yang didirikan berdasarkan Kepgub Nomor 061.1/Kep.860/HUK/86 tanggal 23 juni 1986;

- b. UPTD Balai Benih Induk Padi, berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur yang didirikan berdasarkan Kepgub Nomor 061.1/Kep.861/HUK/86 tanggal 23 juni 1986;
- c. UPTD Balai Benih Induk Hortikultura, berkedudukan di Pasibanteng Kabupaten Sumedang didirikan berdasarkan Kepgub Nomor 061.1/Kep.862/HUK/86 tanggal 23 juni 1986. Dan merupakan pengembangan dari pusat Pembibitan Pasir Jati yang didirikan tahun 1951;
- d. UPTD Balai Benih Tani Makmur Cihea, berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur didirikan berdasarkan Kepgub Nomor 061.1/Kep.1201-ORTAK/86 tanggal 3 September 1986. Dan merupakan pengalihan dari perusahaan Jawatan Makmur Cihea;
- e. UPTD Balai Percobaan Dan Percontohan Pertanian Tanaman Pangan, berkedudukan di Plumbon Kabupaten Cianjur didirikan berdasarkan Kepgub Nomor 31 Tahun 1989 tanggal 3 November 1986 dan merupakan pengalihan dari Lembaga *Agricultural Development Center* yang berdiri sejak 1976 dan melaksanakan fungsi Balai Latihan Pertanian Daerah yang dibentuk Tahun 1981.

3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi

“TERWUJUDNYA PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT YANG MAJU DAN TANGGUH.”

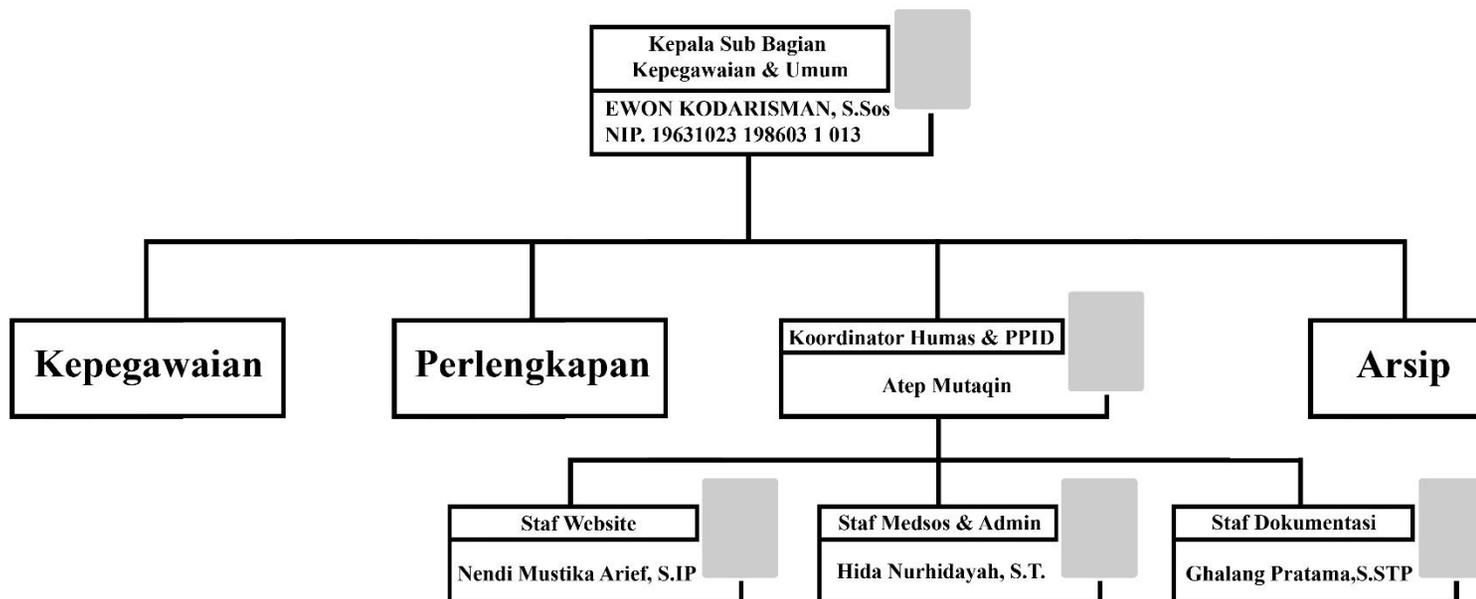
B. Misi

- a. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam dan sarana prasarana;
- c. Mengembangkan, menetapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan akses pasar dan permodalan.

3.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI HUMAS & PPID DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.1.4. Deskripsi Tugas

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, maka setiap bagian pada struktur organisasi tersebut memiliki tugas, wewenang dan fungsi masing-masing yang berbeda untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Berikut ini uraian tugas dari masing-masing bagian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, Perlengkapan, Humas & PPID dan Arsip.
2. Tugas dari bagian Kepegawaian diantaranya :
 - a. Menyusun Rencana Operasional Urusan Bagian Kepegawaian;
 - b. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan IPDN;
 - c. Mengusulkan Perubahan Status PNS menjadi Pejabat Fungsional;
 - d. Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan Jabatan Fungsional, Asisten dan Lektor yang diusulkan oleh Senat Fakultas;
 - e. Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar yang diusulkan Senat Institut;
 - f. Mengolah dan meneruskan usulan kenaikan Jabatan Fungsional lainnya yang diusulkan dari unit kerja bersangkutan;
 - g. Mengelola kenaikan pangkat PNS di Lingkungan IPDN;
 - h. Menyusun rencana kebutuhan diklat pegawai di Lingkungan IPDN;
 - i. Menyiapkan bahan kebijakan promosi, rotasi, mutasi dan demosi pegawai di Lingkungan IPDN;
 - j. Menyiapkan bahan pemberhentian pegawai yang mencapai batas usia pensiun, pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan pensiun pegawai; Menyiapkan bahan pengawasan terhadap disiplin pegawai;

- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Tugas dari bagian Perlengkapan diantaranya :
- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian perlengkapan;
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan;
 - c. Pengumpulan dan Penganalisaan data bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup perlengkapan;
 - d. Penyiapan bahan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup perlengkapan;
 - e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup perlengkapan;
 - f. Pengumpulan bahan dan data penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
 - g. Pelaksanaan tugas ketatausahaan bagian;
 - h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tugas dari bagian Arsip diantaranya :
- a. Menerima warkat;
 - b. Mencatat warkat;
 - c. Mendistribusikan warkat sesuai kebutuhan;
 - d. Menyimpan, menata, dan menemukan kembali arsip sesuai dengan sistem tertentu;
 - e. Memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan arsip;
 - f. Mengadakan perawatan/pemeliharaan arsip;
 - g. Mengadakan atau merencanakan penyusutan arsip, dan lain-lain.
5. Tugas dari bagian Humas dan PPID berdasarkan diantaranya :

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Tugas dari masing-masing bagian Humas & PPID di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Koordinator Humas & PPID yang bertugas bertanggung jawab atas aktifitas di dalam Humas & PPID serta bertanggung jawab atas staf – staf yang ada di Humas & PPID DISTAN JABAR;
2. Staf Website bertugas untuk mengelola website Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
3. Staf Medsos & Admin bertugas untuk mengelola media sosial mulai dari Facebook, Twitter, dan Youtube. Staf ini pun bertugas sebagai yang mengurus masuk dan keluarnya informasi;
4. Staf Dokumentasi bertugas untuk mengelola aktifitas dokumentasi dinas mulai dari rapat dan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methods* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam suatu permasalahan, kata yang mengikutinya adalah

penelitian yang berarti suatu cara untuk mencapai suatu dengan metode tertentu, dengan cara berhati-hati, sistematis dan sempurna terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Pengertian metode penelitian menurut Supriati (2012:5) menyatakan bahwa :
“Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.”

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Dengan demikian penggunaan metode penelitian deskriptif adalah untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat.

3.2.1. Desain Penelitian

Pada desain penelitian ini untuk mendapatkan suatu proses yang teratur dan terarah dalam suatu penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik diperlukan metode pendekatan atau penyelesaian untuk menyelesaikan suatu penelitian. Pada metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian deskriptif dimana pada metode ini memiliki tahap pertama dilakukan pengumpulan data yang diperlukan, dan pada tahap berikutnya adalah mengolah dan membahas sampai pada suatu kesimpulan.

3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

3.2.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Menurut Sugiyono (2013:137) menjelaskan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-

dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan data primer ini, penulis menggunakan metode-metode yang diantaranya adalah :

1. Observasi (*Observation*)

Observasi menurut Supriyati (2011:46) adalah sebagai berikut “suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi”;

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Supriyati (2011:48) adalah sebagai berikut : “Cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan/kebutuhan. wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden”.

Sumber data primer untuk penelitian diperoleh secara langsung dengan mewawancari petugas bagian HUMAS/PPID Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Atep Mutaqin, Bapak Arief dan Ibu Hida selaku pembimbing kami saat melakukan kegiatan Kerja Praktek (KP). Selain wawancara kami pun melakukan observasi dengan melihat kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi Buku Tamu Berbasis Web.

3.2.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Menurut Sugiyono (2013:137) menjelaskan bahwa sumber data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data sekunder untuk penelitian diperoleh atau didapatkan melalui website DISTAN, form prosedur permohonan informasi, form prosedur kunjungan dan prosedur ilustrasi pemohon informasi publik yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan terstruktur dikarenakan pendekatan ini memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis, program disusun dengan logika yang mudah dipahami dan biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah sehingga untuk perangkat lunak berskala kecil dan menengah masih layak digunakan dikarenakan lingkup permasalahannya masih bisa ditangani dengan melihat kebutuhan data yang akan digunakan.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam analisis ini adalah *Waterfall*, yaitu metode pengembangan yang menjadikan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung.